



REVIEW

Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2021- 2026



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 Telp. (031) 3956708, 395709 / Fax. (031) 3956710

KABUPATEN GRESIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
1.5 Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3.2 Kinerja Renstra 2016 – 2020.....	16
2.3.1 Kinerja Renstra 2021 – 2026.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45

4.1 Tujuan	46
4.2 Sasaran.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	51
5.2 MENETAPKAN STRATEGI.....	55
5.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB VIII PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah Personil	15
Tabel II-2 Distribusi Personil	15
Tabel II-3 Sarana Kerja Pendukung	16
Tabel II-4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
Tabel II-5 Kinerja Tahun ke-I Renstra 2021-2026.....	19
Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan	21
Tabel III-2 Tabel Perumusan Penjelasan Visi.....	23
Tabel III-3 Matriks Tujuan Sasaran Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Perindustrian; Perdagangan, RPJMD 2021-2026	26
Tabel III-4 Arah Kebijakan.....	27
Tabel III-5 Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	29
Tabel III-6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	33
Tabel III-7 Permasalahan Pelayanan PD Kabuapten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	34
Tabel III-8 Eksisting Penggunaa Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan Dalam RTRW	36
Tabel III-9 Identifikasi Permasalahan	39
Tabel III-10 Identifikasi Isu Strategis Dari sisi Eksternal.....	40
Tabel III-11 Analisa SWOT.....	41
Tabel III-12 Penilaian Faktor.....	41
Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
Tabel V-1 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kewenangan DISKOPERINDAG.....	49
Tabel V-2 Program Prioritas Kabupaten Gresik 2021-2026 Kewenangan Diskoperindag	50
Tabel V-3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	56
Tabel VI-1 Matrik Program Kegiatan, Subkegiatan	63
Tabel VII-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan	72

Tabel VII-2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	73
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar I.2 Diagram Alur Penyusunan Renstra	8
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, merupakan penyesuaian dan penyempurnaan dari RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Penyesuaian terhadap RENSTRA sebelumnya merupakan tindak lanjut atas kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 -3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyesuaian juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik., menjadi Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.

Selain Penyesuaian dalam Perubahan RENSTRA 2021-2026 penyempurnaan juga dilakukan melalui pembaharuan terhadap program, kegiatan, sub-kegiatan beserta kebutuhan dana dan indikator terhadap isu strategis terbaru khususnya yang terkait dalam pemulihan dan penciptaan ketahanan ekonomi pasca pandemi COVID 19 dan/atau isu strategis lain, yang berasal dari berbagai sumber seperti jaring aspirasi masyarakat, Diskusi dan komunikasi publik, serta hasil evaluasi pembangunan sektor ekonomi yang terkait dengan koperasi usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026.

Seperti halnya RENSTRA 2021-2026 sebelumnya, RENSTRA 2021-2026 perubahan ini juga merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menentukan strategi, dan arahan kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Pada 5 tahun yang akan datang, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman., baik yang berdasar kondisi real saat ini maupun proyeksi beserta data dan informasi yang ada.

Penyusunan RENSTRA Perubahan 2021 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dilakukan melalui 4 pendekatan perencanaan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang antara lain :

- a. Alur proses teknokratis strategis, di mana dalam proses penyusunan Renstra menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan/pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik lima tahun mendatang.
- b. Alur proses partisipatif, di mana dalam menyusun Renstra ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan telah berusaha melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan memiliki akan dokumen Renstra ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan daerah yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Alur proses politis, yaitu bahwa dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan adalah rencana yang disusun dengan menterjemahkan dan menjabarkan dengan tepat dan sistematis visi-misi Kepala Daerah terpilih untuk mencapai sasaran pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan.

- d. Bottom-up Planning, dimana prinsip bottom up planning adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Kemudian dalam proses dan tata cara penyusunan RENSTRA Perubahan 2021-2026, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sedangkan substansinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

RPJMD yang menjadi pedoman substansi RENSTRA perubahan 2021-2026, dapat menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. RENSTRA Perubahan 2021-2026 juga dapat menjadi acuan substansi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang disusun setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : " Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif " ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 272 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/82003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yakni untuk menjadi pedoman perencanaan sejak dilakukannya perubahan hingga tahun 2026.

Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 Koperasi Usaha Mikro, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA Perubahan ini disusun menggunakan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman yang telah di atur dalam PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, yang antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum, dasar hukum, maksud, serta tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 | 6

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, capaian – capaian penting dan capaian program yang telah dilaksanakan pada Renstra sebelum perubahan, dan menjabarkan hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama kurun waktu Renstra Perubahan.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Memuat informasi relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD Perubahan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

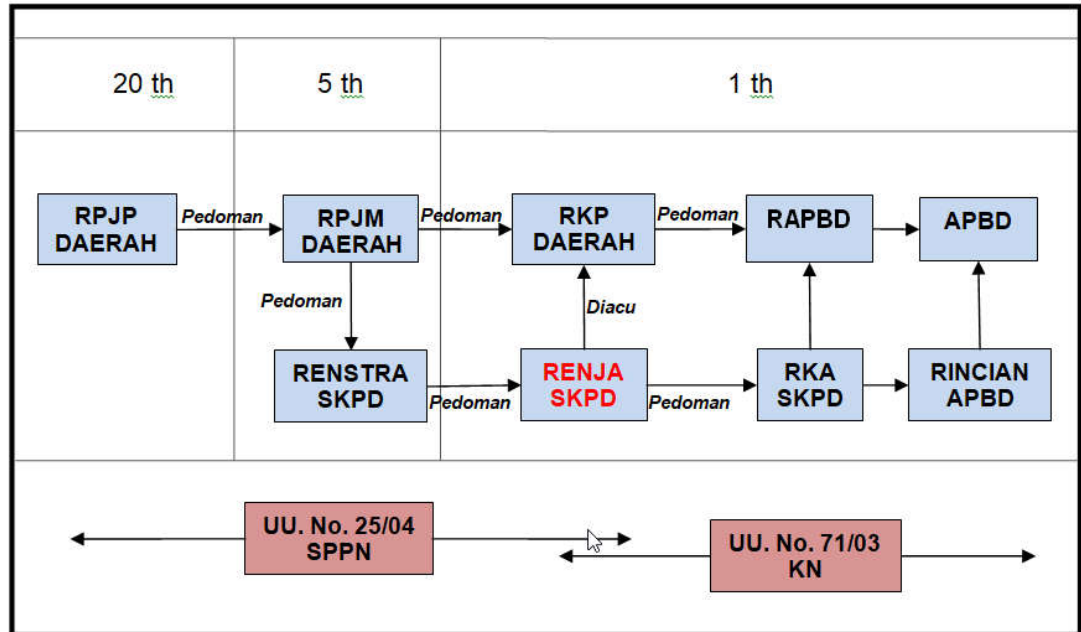
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII Penutup

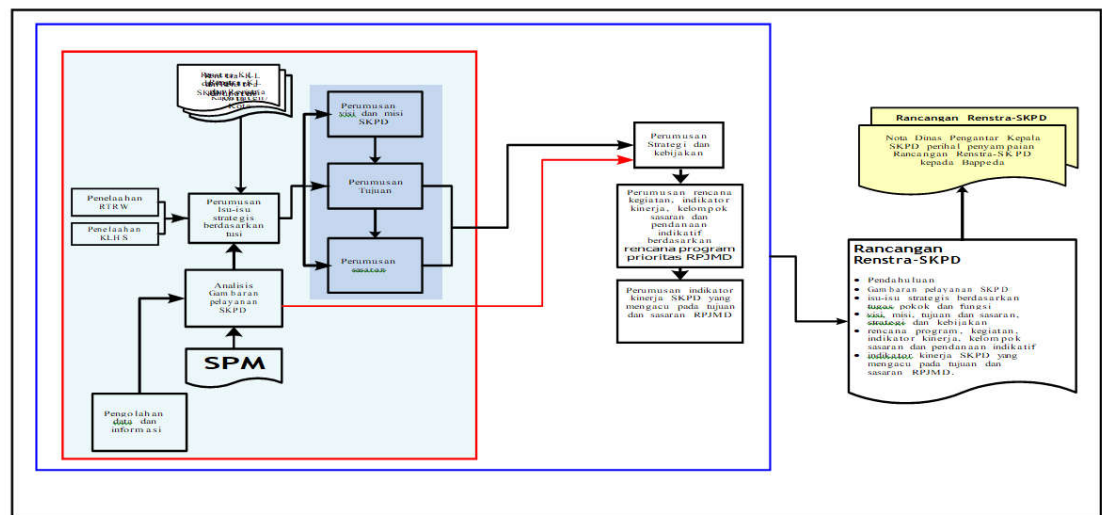
1.5 Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara RENSTRA SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar I.1 Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sedangkan alur proses penyusunan Renstra SKPD sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini



Gambar I.2 Diagram Alur Penyusunan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021, dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ”

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi organisasi sebagai berikut:

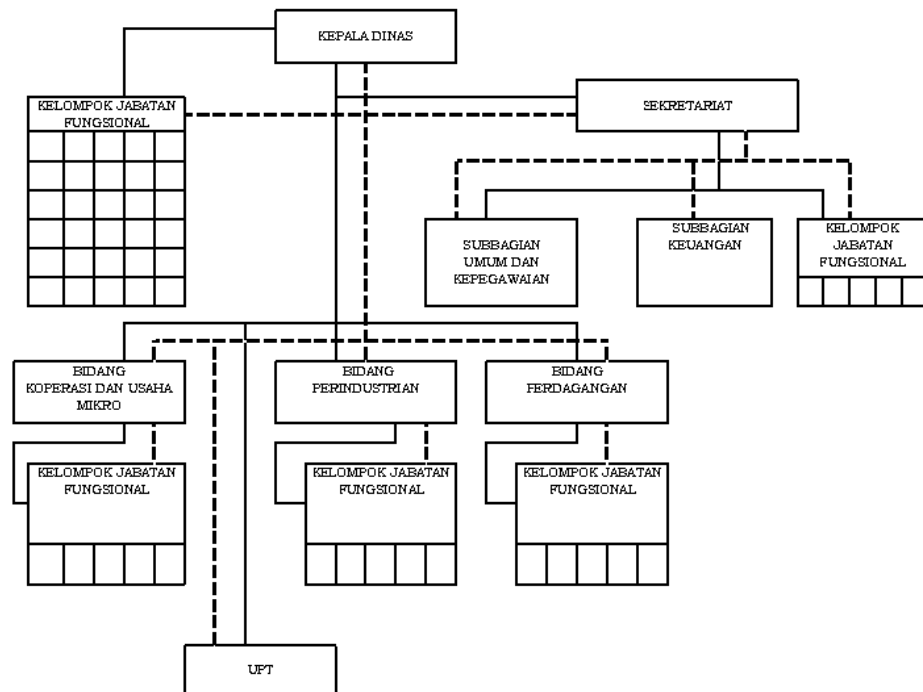
1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan urusan usaha mikro , urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;

Selain ke-5 tugas dan fungsi di atas, tidak menutup kemungkinan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Gresik sesuai dengan bidang tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Pedagangan.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, memiliki Struktur atau susunan Organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPT yang antara lain:
 - a. UPT Metrologi Legal
 - b. UPT Pasar;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar II.1 Struktur Orgsanisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam menjalankan tug didukung oleh 3 bidang dan 1 sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan :
 - i. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - ii. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
 - iii. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - iv. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

- v. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - vi. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - vii. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - viii. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - ix. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - x. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - xi. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - xii. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - xiii. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - xiv. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya;
2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membantu kepala dinas dalam menjalankan :
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - ii. pengusulan penerbitan izin usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di daerah;
 - iii. pengusulan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di daerah;
 - iv. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya di daerah;
 - v. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayahnya keanggotaannya di daerah;

- vi. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di daerah;
 - vii. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha mikro;
 - viii. pengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro di daerah;
 - ix. pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - x. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - xi. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, termasuk rekomendasi pemberian pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi serta pembukaan cabang KSP/USP dan koperasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - xii. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Bidang Perindustrian, membantu kepala dinas dalam menjalankan :
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perindustrian;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perindustrian;
 - iii. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program perindustrian;

- iv. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang perindustrian;
 - v. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - vi. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perindustrian;
 - vii. pelaksanaan pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
4. Bidang Perdagangan, membantu kepala dinas dalam menjalankan :
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perdagangan;
 - ii. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perdagangan;
 - iii. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perdagangan;
 - iv. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perdagangan;
 - v. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
 - vi. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan di bidang perdagangan;
 - vii. pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor dan perlindungan konsumen;
 - viii. pelaksanaan pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perdagangan;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DISKOPERINDAG Kabupaten Gresik didukung oleh SDM sejumlah 64 orang personil yang profil dan distribusinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-1 Jumlah Personil

No.	Uraian Pangkat/Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat 1 (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)			11				11
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)			6				6
	Pengatur (IIc)				3			3
	Pengatur Tingkat I (IId)				12			12
3.	Penata Muda (IIIa)					7		7
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					2		2
	Penata (IIIC)					4		4
	Penata Tingkat I (IIId)					6	2	8
4.	Pembina (IVa)					6	3	9
	Pembina Tingkat I (IVb)							1
	Pembina Utama Muda (IVc)							1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
JUMLAH								64

Tabel II-2 Distribusi Personil

No.	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	8
3	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	5
4	Bidang Perindustrian	5
5	Bidang Perdagangan	14
2	Pasar Kota	8
3	Pasar Baru	11
4	Pasar Sidomoro	2
5	Pasar Giri	1
2	Pasar Driyorejo	5
3	Pasar Sidayu	2
4	Pasar Dukun	5

Selain Sumber Daya Manusia, Dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. DISKOPERINDAG Kabupaten Gresik juga didukung sarana kerja yang terdapat pada tabel II.3 berikut.

Tabel II-3 Sarana Kerja Pendukung

Sarana Pendukung	Jumlah
Kendaraan Roda 4	5
Kendaraan Roda 2	17
Komputer	41
Monitor LCD	4
Laptop	9
Printer	25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang:

1. Koperasi,
2. Usaha Mikro,
3. Perindustrian dan
4. Perdagangan

Kinerja pelayanan DISKOPERINDAG di ukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DISKOPERINDAG, yang setiap tahun dilaporkan dan dievaluasi.

2.3.2 Kinerja Renstra 2016 – 2020

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel II-4 yang merupakan capaian atas realisasi terhadap target yang telah ditentukan pada periode renstra dan rpjmd sebelumnya (2016-2020). Rata-rata rasio capaian kinerja diskoperindag kabupaten gresik adalah sebesar 322,46%.

Tabel II-4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	2638,00	116,67	123,19	435,96	60,20	674,80
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	2575,00	666,67	155,56	96,96	62,07	711,25
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	100,27	92,15	219,83	219,55	194,96	165,35
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	440,33	243,33	100,00	99,67	85,67	193,80
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	85,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	121,28	100,00	127,70	134,65	39,27	104,58

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,50	13,19	2638,00
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,12	3,09	2575,00
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	7,50	7,52	100,27
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3,00	13,21	440,33
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100,00	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	1,41	1,71	121,28

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,6	0,7	116,67
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,15	1	666,67
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	20	18,43	92,15
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	7,3	243,33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	0,7	0,7	100,00

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,69	0,85	123,19
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,18	0,28	155,56
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	30	65,95	219,83
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	3	100,00
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	2,78	3,55	127,70

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	0,89	3,88	435,96
Meningkatnya Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro Yang dibina	%	0,23	0,223	96,96
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Prosentasi Alat UTTP Berterra SAH	%	40	87,82	219,55
	Prosentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	3	2,99	99,67
	Prosentase Pasar Kabupaten yang di Perlihara	%	100	100	100,00
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase IMKM Yang dibina	%	3,55	4,78	134,65

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

2.3.1 Kinerja Renstra 2021 – 2026

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, tahun 2021 periode renstra 2021-2026 sebelum dilakukan perubahan tersaji dalam tabel II-5 yang menunjukkan capaian terhadap realisasi target indikator kinerja utama yang telah ditentukan.

Tabel II-5 Kinerja Tahun ke-I Renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	%	44,17	45,4	102,78
Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,09	0,09	100,00
Meningkatnya Sistem distribusi usaha perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD\$)	%	0,03	21,14	70466,67
Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	%	0,79	0,79	100,00

Sumber data : lppd.ropem.jatimprov.go.id

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemerintah memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perijinan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro juga telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai online marketplace, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama

dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap teknologi.

Selain itu, DISKOPERINDAG juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. DISKOPERINDAG dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian di kabupaten Gresik.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan diidentifikasi permasalahan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dalam Lampiran Undang–Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdapat pada tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Menurunnya Koperasi Aktif	Aspek SDM : 1. Rendahnya Kapasitas SDM Pengelolaan Koperasi. 2. Rendahnya pengetahuan dan Pemahaman SDM Aspek Kelembagaan : 1. Kurang Optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi. 2. Rendahnya Akurasi data dan akses terhadap informasi perkoperasian.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Kinerja Usaha Koperasi Yang Stagnan	Aspek SDM : Kurang nya pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi. Aspek Kelembagaan : Pengawasan, dan pengelolaan informasi yang kurang optimal sebagai dasar penentu arah kebijakan. Aspek Pembiayaan : kurangnya kerjasama dalam menciptakan peluang pembiayaan untuk pengembangan koperasi. Aspek Restrukturisasi usaha : Kurangnya Inovasi dalam menciptakan usaha untuk pengembangan koperasi.
	Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Belum Meningkatkan	Aspek SDM : Rendahnya kapasitas pengetahuan dan pemahaman SDM. Aspek Kelembagaan : Efektifitas pengelolaan Kelembagaan dan pengawasan yang kurang optimal, akibat kurangnya data dan informasi. Aspek Pembiayaan : Lemahnya akses pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro Aspek Produksi : Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi usaha mikro, serta produk yang belum memenuhi standarisasi. Aspek Pemasaran : Belum optimalnya jangkauan dan jaringan pemasaran produk pelaku usaha Mikro.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik akan dibawa untuk berkarya agar konsisten sehingga dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah,

potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

“MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH ”

Visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok Visi pembangunan sebagaimana tersaji pada tabel III.2 berikut:

Tabel III-2 Tabel Perumusan Penjelasan Visi

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2.	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
3.	Gresik yang Berdaya Saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4.	Gresik yang Berkemajuan	Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
5.	Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Dalam upaya mewujudkan visi kabupaten gresik, terdapat 5 langkah atau tahapan yang akan ditempuh yang antara lain :

Misi 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.

Misi 2 :

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Misi 3 :

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Misi 4 :

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Kharimah.

Misi 5 :

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Gresik.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, berperan dalam pencapaian Misi Ke 3 dan Ke 5, yakni untuk mewujudkan kemandirian Ekonomi yang seimbang Antar sektor dan Antar Wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat gresik.

Tabel III-3 Matriks Tujuan Sasaran Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Perindustrian; Perdagangan, RPJMD 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III-4 Arah Kebijakan

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government	Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakhul karimah
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	

Tahun	Arah Kebijakan	Tematik Pembangunan
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Transformasi industri ramah lingkungan, perdagangan yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan kesiapan sdm yang unggul & berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
2025	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan daya saing wilayah serta terjaminnya pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
2026	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry	Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakhul karimah
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	

Program Pembangunan Daerah memiliki urgensi yang vital karena rumusan program yang konkrit dalam bentuk Program Prioritas yang menjadi jembatan dalam pencapaian visi yang dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran strategi yang berpedoman pada arah kebijakan.

Prioritas Program Nawakarsa merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah Program dari Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder lain yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik.

Tabel III-5 Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
1	Gresik Akas	Gresikpedia	Program Aplikasi Informatika
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Gresik rembug akur	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Memperkuat dan mempercepat pelayanan kependudukan catatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
		Desa siap	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Aplikasi Informatika

PERUBAHAN

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Membangun sistem pengaduan sampai tingkat RT	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	Gresik Seger	Gresik satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Gresik santri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Gresik bunda puspa	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
		Bumi Gresik	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
		Gresik Sporti	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		PKH inklusif (untuk kalangan lansia dan disabilitas)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3	Gresik Mapan	Gresik bebas dari banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penanggulangan Bencana
		Membangun taman kota tematik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Gresik kota santri 4.0	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Gresik ramah keluarga	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)
		Gresik transportasi terpadu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj) Program Penyelenggaraan Jalan
		Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Desa
4	Gresik Agropolitan	GO Tani (sektor pertanian dan perikanan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pengembangan kawasan agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Peningkatan kesejahteraan petani herbal	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Nelayan Gresik Berdaulat	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Pembangunan Tekno Park berbasis Minapolitan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5	Gema Karya	Gresik Jagoan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Gresik Komik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program fasilitas serta pembekalan lulusan baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor
		Meningkatkan PAD desa (Penguatan BUMDES, dan BUMDES Bersama)	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Optimalisasi aset pemda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Koridor investasi Gresik (KIG)	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6	Gresik Cerdas	Insentif pendidikan untuk siswa SD dan SMP Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu, huffadz dan disabilitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
		Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadi pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkat potensi serta infrastruktur pendidikan dipulau bawean	Program Pengelolaan Pendidikan
		Mendirikan akademi komonitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
7	Gresik Sehati	Gresik sehati (memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui layana BPJS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Spesialis pada Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan tunjangan kinerja tenaga Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Lahir pulang bawa akta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pelibatan Masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Memperkuat rumah sakit bawean menjadi rumah sakit tipe C dengan dokter spesialis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembangunan Rumah Sakit di Gresik Selatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Gresik Barokah	Membangkitkan kesetia kawan sosial, kepahlawanan, dan kepeloporan warga Gresik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Menguatkan pembentukan karakter pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Melindungi segenap generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan lembaga keagamaan untuk memberikan tauladan kesalehan sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
9	Gresik Lestari	Revitalisasi Gresik Kota Tua	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Kawasan Permukiman
		Pengembangan revitalisasi ekowisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
		Mendorong filosofi ramah lingkungan (Lubang Serapan Bipori)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Mendorong terciptanya Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B)
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	Program Pengelolaan Persampahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L berserta faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel III-6 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dan koperasi dalam perekonomian	Tingkat kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembina perkerjasama dan Usaha Mikro	Kewenangan untuk membina koperasi dan Usaha Mikro
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	Kompetensi pengawas perkerjasama dan Usaha Mikro
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	Animo masyarakat untuk berkerjasama dan berwirausaha
2	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Arah Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro	SOP disetiap Kegiatan
			Lemahnya kerjasama koperasi dalam penyampaian data	Data Perkembangan berbasis digitalisasi
		Masyarakat sadar untuk berkerjasama namun kurang memahami perkerjasama	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder masih sedikit	Pertumbuhan jumlah koperasi
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluang usaha koperasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD	Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Belum optimal dalam <i>update</i> data	Database Usaha Mikro belum update	
		Sarana prasarana kurang optimal	Sarana Prasarana pasar, Sentra PKL, Pujasera belum optimal	Keberadaan Pasar, Sentra PKL, Pujasera
		Tingkat kualitas produk Usaha Mikro	Daya tahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro	Pertumbuhan pasar lokal dan regional
		Kurangnya modal bagi Usaha Mikro	Banyaknya produk impor	Muncul dan tumbuhnya industri kreatif
			Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama <i>stakeholder</i> eksternal kepada pelaku Usaha Mikro
		Pelaku Usaha Mikro tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua Usaha Mikro memiliki standarisasi produk	

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dapat dilihat dalam tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel III-7 Permasalahan Pelayanan PD Kabuapten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD Kabupaten	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya jumlah KSP Sehat	Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder masih sedikit	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluang usaha koperasi
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif-	Arah Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro	Kewenangan untuk membina koperasi dan Usaha Mikro
			Lemahnya kerjasama dalam penyampaian data	SOP disetiap Kegiatan
3	Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dan Usaha Mikro	Tingkat Kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembinaan perkoperasian dan Usaha	Kompetensi pengawas perkoperasian dan Usaha Mikro

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan PD Kabupaten	Penghambat	Pendorong
			Mikro	
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	
4	Meningkatnya rasio volume usaha terhadap modal	Belum optimal dalam <i>update</i> data	Database Usaha Mikro belum <i>update</i>	Data Perkembangan berbasis IT (SIM – KUM))
		Sarana Prasarana pendukung belum optimal	Sarana prasarana Pasar, Sentra PKL, Pujasera belum optimal	Keberadaan Pasar, Sentra PKL, Pujasera
		Tingkat kualitas produk Usaha Mikro	Daya tahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro	Muncul dan tumbuhnya industri kreatif
		Kurangnya modal bagi Usaha Mikro	Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro
			Banyaknya Produk Impor	
		Pelaku Usaha Mikro tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua Usaha Mikro memiliki standarisasi produk	Pertumbuhan pasar lokal dan regional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis didapatkan faktor-faktor perencanaan peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar
 - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar
 - c. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar
 - d. Blok Rimba Suaka Margasatwa 3,891.60 hektar
 - e. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar
 - f. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar

2. Kawasan Budidaya

- a. Kawasan Pemukiman 20.063.55 hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372.70 hektar
- c. Kawasan Perikanan Budidaya 21.638.76 hektar
- d. Kawasan Hortikultura 16.885.48 hektar
- e. Kawasan Industri 12.448.03 hektar
- f. Kawasan Perdagangan, Jasa dan Fasum 6.644.01 hektar
- g. Kawasan Perkenbunan 2.573.67 hektar
- h. Kawasan Hutan Produksi 1.017.00 hektar
- i. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar
- j. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar
- k. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar
- l. Kawasan Pelabuhan 1.257.69 hektar

Tabel III-8 Eksisting Penggunaa Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan Dalam RTRW

KAWASAN LINDUNG			
No	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan (ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9.426.12	-
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5.828.52	1.804.82
3	Kawasan Terumbu Karang	5.387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.831.60	3.831.60
5	Kawasan Resapan Air	1.252.58	1.040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
J U M L A H		26.450.92	7.401.39
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Pemukiman	26.063.55	15.331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.372.70	39.572.98
3	Kawasan Perikanan Budi Daya	21.678.36	31.092.21
4	Kawasan Hortikultural	16.885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12.448.03	10.108

No	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan (ha)
6	Kawasan Perdagangan, Jasa dan Fasum	6.640.01	2.797.65
7	Kawasan Perkebunan	2.573.67	10.761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1.017.00	6.544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1.257.69	366.89
	Jumlah	112.909.02	117.192.25
	TOTAL	139.359.94	125.193.64

Sumber: Study Peninjauan Kembali Perda RTRW Tahun 2015

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan Kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,9%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan lahan budaya, kawasan perikanan budaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan dan kawasan bandar udara, sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan.

Untuk kawasan dengan peruntukan industri tersisa seluas 2.339.46 hektar dan untuk kawasan dengan peruntukan perdagangan tersisa seluas 3.846.36 hektar. Sedangkan kebutuhan lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan yang dijelaskan di implikasi RTRW.

Dalam menelaah keterkaitan Renstra perubahan 2021-2026 dengan RTRW dan KLHS, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Yang mana Dalam RPJMD pada keterkaitan program, strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW pada tabel 1.12, tabel 1.13, dan tabel 1.14. dan serta KLHS pada tabel 1.15 pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

Sebagai dinas yang berperan dalam pencapaian misi ke-3 dan ke-5, Kebijakan RTRW yang terkait yakni :

1. Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan
2. Pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan

Sedang Strategi RTRW yang terkait yakni :

1. Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan
2. Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan
3. Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK
4. Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan
5. Melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
6. Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial

Kemudian untuk kaitan Program RTRW yakni terkait dengan penelusuran potensi industri berbasis komoditas, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemantapan kelembagaan. Untuk KLHS isu strategis Penurunan Kemandirian Masyarakat, Termasuk Masyarakat Pesisir menjadi kaitan mengingat kesesuaian dengan misi 5 yang tercantum pada tabel 1.15 pada RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan serta tantangan eksternal baik dari lokal / bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industri terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi/ keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang dimuat pada BAB II dapat dilihat pada tabel III.9 sebagaimana tersaji di bawah ini.

Tabel III-9 Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD	Koperasi aktif menurun	IKK	- Pendampingan Koperasi dalam keaktifan pelaporan - Pengawasan koperasi dalam Pembinaan Kompetensi perkoperasian	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Kekuatan modal koperasi - Regenerasi koperasi yg belum siap	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
	Pertumbuhan usaha mikro belum meningkat	IKK	- Pendampingan pelaku usaha mikro - Pelatihan dan Pendampingan	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	- Terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan usaha mikro - <i>Database</i> usaha mikro masih belum sepenuhnya update dan detail

Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Penumbuhan Kinerja Usaha Koperasi		Rendahnya kinerja Koperasi	Regulasi bidang koperasi masih belum konsisten	- Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
	Penumbuhan Wirausaha Baru		Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	

Sedang identifikasi Isu-Isu Strategis dari sisi eksternal dapat adalah sebagai berikut :

Tabel III-10 Identifikasi Isu Strategis Dari sisi Eksternal

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Globalisasi perdagangan	Kontribusi koperasi dan usaha mikro di Indonesia cukup tinggi namun produk belum memiliki <i>value</i> yang tinggi	Jaminan kemudahan, fasilitasi akses permodalan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi koperasi dan pelaku usaha mikro	-
2	Pertumbuhan koperasi di Negara maju sangat pesat	-	Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro : ecobis, e-lokal market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll	-
3	Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN	Daya saing koperasi dan usaha mikro di Indonesia masih terbatas Belum terdapat standarisasi terhadap produk		-
4	Koperasi berbasis internasional	Daya saing koperasi di Indonesia masih lemah	Peluang pangsa pasar dan meningkatnya persaingan bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional	-
		Permodalan dan pemasaran produk usaha mikro		-
		Legalitas usaha mikro		-

Identifikasi tugas dan fungsi serta identifikasi permasalahan diatas selanjutnya dilakukan penilaian pada permasalahan yang teridentifikasi dikaitkan dengan faktor internal dan eksternal yang mungkin dapat menghambat atau memberikan peluang. Adapun penilaian permasalahan yang teridentifikasi antaralain :

Tabel III-11 Analisa SWOT

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll. 3. Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti Pasar dan Sentra PKL, Pujasera 4. Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro	1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro 2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UM 3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional 5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro 6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro
KELEMAHAN / WEAKNES (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usaha mikro yang berkompetensi dibidangnya 2. Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik 3. Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro (Pasar dan Sentra PKL, Pujasera sarana prasarana pendukung yang belum optimal 4. Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya	1. Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum 2. Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar 3. Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik 4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk usaha mikro

Tabel III-12 Penilaian Faktor

PENILAIAN FAKTOR INTERNAL			
STRENGTHS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro	5	0.09
S2	Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll.	5	0.09
S3	Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti, Pasar dan Sentra UKM	3	0.06
S4	Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro	5	0.09
WEAKNESS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)

W1	Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usaha mikro yang berkompetensi dibidangnya	5	0.09
W2	Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik	5	0.09
W3	Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro Pasar, Sentra PKL, Pujasera sarana prasarana pendukung yang belum optimal	4	0.08
W4	Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya	4	0.08

PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL			
OPPORTUNITIES		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro	5	0.09
O2	Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi, usaha mikro dan IKM	5	0.09
O3	Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif	3	0.05
O4	Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional	5	0.09
O5	Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro	5	0.09
O6	Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro	4	0.07
THREATS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)

T1	Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum	5	0.1
T2	Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar	5	0.1
T3	Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik	3	0.06
T4	Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk usaha mikro	4	0.08

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian dan Provinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di kabupaten gresik yang belum optimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan Usaha Mikro perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik harus mendukung Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan Usaha Mikro perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien.

Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya perekonomian sebuah daerah secara umum, Koperasi dan Usaha Mikro secara khusus.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan Visi pembangunan yang sekaligus menjadi Visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah". Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor Dan antar wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik memberikan tanggung jawab dalam mendukung misi ketiga dan kelima Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah" serta "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik".

Dalam mencapai misi tersebut RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 mendefinisikan tujuan dalam mencapai misi "Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah" adalah dengan

Menguatkan pembangunan perekonomian gresik baru yang inklusif yang diukur dengan indicator Pertumbuhan Ekonomi. Sedang tujuan dalam mencapai misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik” adalah dengan meningkatkan kesejahteraan social melalui penguatan sektor ketenaga kerjaan yang diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka.

Dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gresik, serta mempertimbangkan Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, sasaran dari tujuan diatas, antara lain "Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah" yang merupakan sasaran dari tujuan Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah, serta “Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan” yang merupakan sasaran dari tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik, menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

4.1 Tujuan

Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah, serta Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan merupakan tanggung jawab dan kewajiban Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 di atas.

Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah yang diukur secara spesifik dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gresik menggunakan Indeks Williamson dan secara nasional menggunakan Koefisien Gini yang diukur oleh BPS, merupakan instrument yang digunakan dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain Indeks Williamson maupun Koefisien Gini merupakan instrument yang mengukur

seberapa besar kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan di suatu wilayah.

Formulasi pengukuran disparitas atau kesenjangan baik menggunakan Koefisien Gini maupun Indeks Williamson, secara umum membutuhkan data persentase penduduk, persentase kumulatif penduduk, persentase kumulatif total pendapatan, PDRB, jumlah penduduk keseluruhan, PDRB perkapita, laju inflasi dan persentase garis kemiskinan.

Berdasarkan formulasi pengukuran kesenjangan/ketimpangan ekonomi diatas, dalam mencapai target sasaran Menurunya ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah sebagai tujuan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya dapat melakukan interferensi untuk menekan laju inflasi dan meningkatkan PDRB dan peluang pendapatan penduduk.

Mempedomani strategi dalam menurunkan ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah yang dimuat dalam RPJMD 2021-2016, yakni Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry, serta harmonisasi terhadap renstra kementerian dan dinas koperasi, umkm provinsi jawa timur. Maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tujuan pelayanan untuk menurunkan ketimpangan antar sektor antar wilayah 2 tujuan turunan antarlain Mewujudkan Ekonomi Inklusif melalui peningkatan peran Koperasi, dan Mewujudkan Ketahanan dan Stabilitas Perekonomian agar pencapaian dapat tercapai secara optimal dan sejalan dengan target kinerja pembangunan provinsi dan kementerian pusat.

Selanjutnya terkait dengan Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan dan keberhasilannya diukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia produktif disuatu wilayah yang aktif dalam kegiatan

perekonomian. Interferensi pelayanan yang sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang tentunya sejalan dengan target kinerja pembangunan provinsi dan kementerian pusat, adalah dengan memperluas kegiatan perekonomian sehingga dapat menciptakan dan memperluas Lapangan Kerja.

4.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan pelayanan yakni, “Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah” serta “Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan”, optimalisasi dan harmonisasi terhadap renstra kementerian dan dinas koperasi umkm provinsi jawa timur membuat ke 2 tujuan pelayanan tersebut memiliki tujuan turunan yang memiliki sasaran dan ukuran indikator:

Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor antar wilayah		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Ekonomi Inklusif melalui peningkatan peran Koperasi	Meningkatnya Peran Koperasi	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A
Mewujudkan Ketahanan dan Stabilitas Perekonomian	Terkendalinya Aktivitas Perdagangan di kabupaten gresik.	Perubahan IHK
	Meningkatnya Nilai Neraca Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor
2. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menciptakan dan memperluas Lapangan Kerja	Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah serta Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik, merupakan tantangan besar yang di berikan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam lima tahun yang akan datang. dalam dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026 Kabupaten Gresik kedua tantangan besar yang merupakan misi ke-3 dan ke-5, memiliki tujuan, sasaran dan strategi sebagaimana tersaji pada tabel V-1 berikut.

Tabel V-1 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kewenangan DISKOPERINDAG.

Misi III "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.3 Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>

Misi V "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026

Selain mewujudkan kedua tantangan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas. sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik juga memiliki kewajiban dalam mewujudkan program nawakarsa yang merupakan program prioritas Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. beberapa program nawakarsa yang terkait dan sesuai dengan Kewenangan, tugas dan fungsi DISKOPERINDAG antara lain :

Tabel V-2 Program Prioritas Kabupaten Gresik 2021-2026 Kewenangan Diskoperindag

NawaKarsa	Output Kunci	Program
Gresik Akas	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Gresik Akas	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Gresik Akas	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Pengembangan UMKM
Gema Karya	3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Gema Karya	3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program Pengembangan Ekspor
Gema Karya	One pesantren one product	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Gema Karya	One pesantren one product	Program Pengembangan UMKM

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026

Strategi, Sasaran, dan Tujuan serta Program Prioritas yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 diatas merupakan pedoman dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang.

Harmonisasi antara Strategi, Sasaran, dan Tujuan serta Program Prioritas Kabupaten Gresik terhadap tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, dalam pencapaian target pembangunan daerah. Harmonisasi Strategi dan Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat merumuskan perencanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Perumusan strategi didasarkan atas analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun faktor internal mencakup hal – hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi.

5.1 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan
 - a. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - b. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain , embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll.
 - c. Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti Pasar dan Sentra PKL, Pujasera
 - d. Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro
 - e. Adanya sasaran binaan Koperasi, Usaha Mikro dan IMKM di Kabupaten Gresik.
2. Kelemahan
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usaha mikro yang berkompetensi dibidangnya
 - b. Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik
 - c. Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro, Pasar dan Sentral UKM sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal
 - d. Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya

Analisis Lingkungan Eksternal

3. Peluang
 - a. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro

- b. Perhatian pemerintah sangat tinggi terhadap animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UMKM
 - c. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif
 - d. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional
 - e. Kerja sama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro
 - f. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro.
4. Ancaman
- a. Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum
 - b. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan terhadap program inovatif;
 - c. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan terhadap program inovatif;
 - d. Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar
 - e. Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik
 - f. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk usaha mikro

Faktor internal yang mencakup hal – hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, Serta Faktor eksternal yang mencakup peluang dan tantangan, diatas merupakan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan jika di kelola dan dihadapi dengan bijak. Kebijakan yang dilakukan dalam mengelola dan menghadapi faktor internal dan eksternal, melalui pendayagunaan tiap komponen faktor, seperti menggunakan kekuatan untuk meraih peluang dan

menekan ancaman, kemudian memanfaatkan peluang untuk menekan dan mengantisipasi ancaman dan kelemahan.

Kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produktifitas koperasi melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan pembinaan koperasi usaha mikro Perindustrian dan Perdagangan secara intensif dan berkelanjutan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mendorong pertumbuhan usaha kreatif dan memperluas jangkauan pemasaran sampai dengan nasional dan internasional
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas, sarana prasarana serta aksesibilitas fasilitas tempat berusaha dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kerjasama antar stakeholder
- d. Pembuatan dan penyesuaian produk hukum (perda/perbub) untuk dapat mengakomodasi perkembangan koperasi, usaha mikro dan kreatif.
- e. Menyusun Program Pembangunan Koperasi usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dan yang sinergis Lintas Instansi.

Kekuatan yang ada untuk menekan ancaman sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara intensif dan Meningkatkan peraturan terhadap pelanggaran perkoperasian.
- b. Penyediaan produk hukum yang menjamin dan mendukung penggunaan produk local.
- c. Mengembangkan aplikasi berbasis TIK yang dapat mendorong kerjasama kemitraan antar pelaku usaha mikro, industri kecil, menengah dan besar

- d. Menegakkan peraturan daerah yang terkait dengan keamanan dan ketertiban umum di bagi PKL Kabupaten Gresik .

Peluang yang dimiliki untuk mendorong kelemahan antara lain :

- a. Meningkatkan profesionalismen dan jumlah SDM Pembina dan Pengelola Perkoperasian dan Usaha Mikro.
- b. Menyusun data base pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha mikro dan usaha kreatif.
- c. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif.
- d. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro melalui pembinaan, pelatihan serta pendampingan untuk pemberdayaan dan perluasan jaringan pemasaran sampai dengan lingkup nasional dan internasional

Menekan kelemahan dan ancaman sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi secara intensif dan berkelanjutan.
- b. Menyiapkan database pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro pelaku UMKM termasuk didalamnya strategi kerjasama untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pelaku UMKM.
- c. Melakukan peningkatan aksesabilitas dan optimalisasi agar pedagang, usaha mikro, PKL memiliki minat yang tinggi untuk dapat mengisi stand yang masih kosong.

- d. Melakukan peningkatan aksesabilitas dan optimalisasi agar usaha mikro, PKL memiliki minat yang tinggi untuk dapat mengisi stand yang masih kosong.
- e. Mengkaji dan mengidentifikasi terjadinya permasalahan dan kebutuhan Koperasi usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan;

5.2 MENETAPKAN STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD tahun 2021 - 2026 yang sesuai dengan Kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dirumuskan dengan menjabarkan tujuan sasaran dinas yang telah diuraikan pada bab I. Satu atau lebih arah kebijakan menjelaskan implementasi strategi tertentu. Satu atau lebih Strategi dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Demikian seterusnya, sehingga pelaksanaan seluruh arah kebijakan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan dinas, serta pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan urusan koperasi, usah mikro, perindustrian dan perdagangan seperti yang digambarkan pada Tabel V-3 Berikut.

Tabel V-3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

VISI Kabupaten Gresik : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya saing dan Berekemajuan Berlandaskan Akhlakul Khorimah			
MISI Kabupaten Gresik :			
Misi 3 : Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
TUJUAN Kabupaten Gresik:			
Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif			
SASARAN Kabupaten Gresik:			
Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah			
STRATEGI Kabupaten Gresik:			
Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Ekonomi Inklusif melalui peningkatan peran Koperasi	Meningkatnya Peran Koperasi	a. Meningkatkan Koperasi Aktif b. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	a. Peningkatan Koperasi Aktif b. Peningkatan Kualitas dan kelembagaan dan pengawasan koperasi c. Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas SDM Pengelola Koperasi d. Peningkatan Kapasitas dan daya Saing Kelembagaan Koperasi
Mewujudkan Ketahanan dan Stabilitas Perekonomian	Terkendalinya Aktivitas Perdagangan di kabupaten Gresik.	a. Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok b. Menjaga Aktivitas Distribusi dan Perdagangan	a. Menjaga Perubahan Indeks Harga Konsumen dibawah 3% b. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana distribusi dan Perdagangan c. Menjaga stabilitas konsumen dalam Kabupaten Gresik
	Meningkatnya Nilai Neraca Perdagangan	Meningkatkan nilai ekspor kabupaten Gresik	Mengembangkan potensi ekspor kabupaten Gresik

VISI Kabupaten Gresik : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya saing dan Berekemajuan Berlandaskan Akhlakul Khorimah			
MISI :			
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
TUJUAN Kabupaten Gresik:			
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan			
SASARAN Kabupaten Gresik:			
Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan			
STRATEGI Kabupaten Gresik:			
Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan dan memperluas Lapangan Kerja	Meningkatnya daya saing UMKM	a. Memperkuat Kapabilitas dan kualitas UMKM b. Memperkuat Pengendalian dan Evaluasi UMKM	a. Mendorong Peningkatan kuantitas Usaha Mikro. b. Penguatan Kapabilitas Usaha Mikro c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi UMKM d. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil Menengah, melalui fasilitasi legalisasi usaha. e. Penguatan serta standarisasi data dan Informasi terkait Industri Kecil dan Menengah.

5.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	:	MEWUJUDKAN EKONOMI INKLUSIF MELALUI PENINGKATAN PERAN KOPERASI																																				
SASARAN	:	MENINGKATNYA PERAN KOPERASI																																				
STRATEGI : MENINGKATKAN KOPERASI AKTIF																																						
Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Peningkatan Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A																																				
<table><tr><td colspan="2">2021</td><td colspan="2">2022</td><td colspan="2">2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>65.60%</td><td>133.249.630</td><td>66.35%</td><td>139.912.111,50</td><td>66.98%</td><td>146.907.717</td></tr><tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2026</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>67.48%</td><td>154.253.103</td><td>67.87%</td><td>161.965.758</td><td></td><td>161.965.758</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	65.60%	133.249.630	66.35%	139.912.111,50	66.98%	146.907.717	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	67.48%	154.253.103	67.87%	161.965.758		161.965.758
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
65.60%	133.249.630	66.35%	139.912.111,50	66.98%	146.907.717																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
67.48%	154.253.103	67.87%	161.965.758		161.965.758																																	
STRATEGI : MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI																																						
Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya																																				
<table><tr><td colspan="2">2021</td><td colspan="2">2022</td><td colspan="2">2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>44.38%</td><td>99.999.643</td><td>48.49%</td><td>104.999.625,20</td><td>52.60%</td><td>110.249.606</td></tr><tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2026</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>56.71%</td><td>115.762.087</td><td>60.82%</td><td>121.550.191</td><td></td><td>121.550.191</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	44.38%	99.999.643	48.49%	104.999.625,20	52.60%	110.249.606	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	56.71%	115.762.087	60.82%	121.550.191		121.550.191
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
44.38%	99.999.643	48.49%	104.999.625,20	52.60%	110.249.606																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
56.71%	115.762.087	60.82%	121.550.191		121.550.191																																	
Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih																																				
<table><tr><td colspan="2">2021</td><td colspan="2">2022</td><td colspan="2">2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>15.01%</td><td>156.489.880</td><td>16.18%</td><td>164.314.374,00</td><td>17.31%</td><td>172.530.093</td></tr><tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2026</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>18.41%</td><td>181.156.597</td><td>19.49%</td><td>190.214.427</td><td></td><td>190.214.427</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	15.01%	156.489.880	16.18%	164.314.374,00	17.31%	172.530.093	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	18.41%	181.156.597	19.49%	190.214.427		190.214.427
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
15.01%	156.489.880	16.18%	164.314.374,00	17.31%	172.530.093																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
18.41%	181.156.597	19.49%	190.214.427		190.214.427																																	
Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Peningkatan Kapasitas dan daya saing kelembagaan Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Omzet Koperasi																																				
<table><tr><td colspan="2">2021</td><td colspan="2">2022</td><td colspan="2">2023</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>2.68%</td><td>415.823.854</td><td>2.74%</td><td>436.615.046,70</td><td>2.79%</td><td>458.445.799</td></tr><tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2026</td></tr><tr><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td><td>Target</td><td>Pagu Indikatif</td></tr><tr><td>2.83%</td><td>481.368.089</td><td>2.87%</td><td>505.436.493</td><td></td><td>505.436.493</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	2.68%	415.823.854	2.74%	436.615.046,70	2.79%	458.445.799	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	2.83%	481.368.089	2.87%	505.436.493		505.436.493
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
2.68%	415.823.854	2.74%	436.615.046,70	2.79%	458.445.799																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
2.83%	481.368.089	2.87%	505.436.493		505.436.493																																	

TUJUAN	:	MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN STABILITAS PEREKONOMIAN
SASARAN	:	TERKENDALINYA AKTIFITAS PERDAGANGAN DI KABUPATEN GRESIK.

STRATEGI : MENGENDALIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

Arah Kebijakan	Program				Indikator	
Menjaga Perubahan Indeks Harga Konsumen dibawah 3%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Perubahan IHK	
	2021		2022		2023	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	<3%	439.121.444	<3%	461.077.516,20	<3%	484.131.392
	2024		2025		2026	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	<3%	508.337.962	<3%	533.754.860		533.754.860

STRATEGI : MENJAGA AKTIFITAS DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN

Arah Kebijakan	Program				Indikator	
Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana distribusi dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	
	2021		2022		2023	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	100%	1.822.689.007	100%	1.913.823.457,40	100%	2.009.514.630
	2024		2025		2026	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
	100%	2.109.990.362	100%	2.215.489.880		2.215.489.880

PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA GRESIK AKAS & GEMA KARYA

Arah Kebijakan		Program		Indikator	
Menjaga stabilitas konsumen dalam Kabupaten Gresik		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	
2021		2022		2023	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
97,34%	384.999.920	97,34%	404.249.916,00	97,34%	424.462.412
2024		2025		2026	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
97,34%	445.685.532	97,34%	467.969.809		467.969.809

SASARAN : MENINGKATKAN NILAI NERACA PERDAGANGAN**STRATEGI : MENINGKATKAN NILAI EKSPOR KABUPATEN GRESIK**

Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Mengembangkan potensi ekspor kabupaten gresik	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor																																				
<table><tr><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">2022</th><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th></tr><tr><td>2.03%</td><td>141.549.790</td><td>2.32%</td><td>148.627.279,50</td><td>2.59%</td><td>156.058.643</td></tr><tr><th colspan="2">2024</th><th colspan="2">2025</th><th colspan="2">2026</th></tr><tr><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th></tr><tr><td>2.84%</td><td>163.861.576</td><td>3.07%</td><td>172.054.654</td><td></td><td>172.054.654</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	2.03%	141.549.790	2.32%	148.627.279,50	2.59%	156.058.643	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	2.84%	163.861.576	3.07%	172.054.654		172.054.654
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
2.03%	141.549.790	2.32%	148.627.279,50	2.59%	156.058.643																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
2.84%	163.861.576	3.07%	172.054.654		172.054.654																																	
PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA GRESIK AKAS & GEMA KARYA																																						

TUJUAN : MENCIPTAKAN DAM MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA**SASARAN :** MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM**STRATEGI : MENGUATKAN KAPABILITAS DAN KUALITAS UMKM**

Arah Kebijakan	Program	Indikator																																				
Mendorong Peningkatan kuantitas Usaha Mikro.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro																																				
<table><tr><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">2022</th><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th></tr><tr><td>1.12%</td><td>212.569.840</td><td>1.23%</td><td>223.198.332,00</td><td>1.35%</td><td>234.358.249</td></tr><tr><th colspan="2">2024</th><th colspan="2">2025</th><th colspan="2">2026</th></tr><tr><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th><th>Target</th><th>Pagu Indikatif</th></tr><tr><td>1.46%</td><td>246.076.161</td><td>1.58%</td><td>258.379.969</td><td></td><td>258.379.969</td></tr></table>			2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	1.12%	212.569.840	1.23%	223.198.332,00	1.35%	234.358.249	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	1.46%	246.076.161	1.58%	258.379.969		258.379.969
2021		2022		2023																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
1.12%	212.569.840	1.23%	223.198.332,00	1.35%	234.358.249																																	
2024		2025		2026																																		
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif																																	
1.46%	246.076.161	1.58%	258.379.969		258.379.969																																	
<i>PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA GRESIK AKAS & GEMA KARYA</i>																																						

Arah Kebijakan	Program				Indikator
Penguatan Kapabilitas Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Persentase usaha mikro dengan akses permodalan
2021		2022		2023	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
0.12%	6.134.441.001	0.12%	6.441.163.051,10	0.12%	6.763.221.204
2024		2025		2026	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
0.12%	7.101.382.264	0.12%	7.456.451.377		7.456.451.377

PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA GRESIK AKAS & GEMA KARYA

Arah Kebijakan		Program		Indikator	
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi UMKM		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	
2021		2022		2023	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
0.70%	87.599.890	0,84%	91.979.884,50	0,98%	96.578.879
2024		2025		2026	
Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1,10%	101.407.823	1,20%	106.478.214		106.478.214

STRATEGI : MEMPERKUAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI UMKM

Arah Kebijakan	Program				Indikator		
Penguatan Kelembagaan Industri Kecil Menengah, melalui fasilitasi legalisasi usaha.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya		
		2021		2022		2023	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
	1.30%	159.739.910	1,35%	167.726.905,50	1,39%	176.113.251	
		2024		2025		2026	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
	1,43%	184.918.913	1,47%	194.164.859		194.164.859	

Arah Kebijakan	Program				Indikator		
Penguatan serta standarisasi data dan Informasi terkait Industri Kecil dan Menengah.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas		
		2021		2022		2023	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
	0,99%	115.279.880	0,99%	121.043.874,00	0,99%	127.096.068	
		2024		2025		2026	
	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
	0,99%	133.450.871	0,99%	140.123.415		140.123.415	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada

A. Prioritas I : Program Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam visi-misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada prioritas I ini Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan masuk pada program prioritas Nawakarsa :

- a. **GRESIK AKAS** dengan satu output kunci Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan yang didukung 3 program yaitu
 - i. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - ii. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - iii. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. **GEMA KARYA** dengan dua output kunci :
 - i. 3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik didukung 2 program yaitu :
 - 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Program Pengembangan Eksport.

ii. One Pesantren one produk (OPOP) didukung 2 program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

B. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

C. Belanja Wajib : Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel VI-1 Matrik Program Kegiatan, Subkegiatan
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021-2026

Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Out come/out put	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang Pengampu
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah realisasi capaian program tahun n / jumlah target capaian program tahun n * 100	100%	10.924.015.000	100%	9.264.368.000	100%	9.699.854.000	100%	10.852.458.000	100%	12.198.387.000	100%	12.808.306.350	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan money		20 dokumen	44.981.096	20 dokumen	47.230.151	20 dokumen	49.591.658	20 dokumen	52.071.241	20 dokumen	30.387.165	20 dokumen	57.408.543	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang di cetak		18 Jenis Dokumen	24.999.596	18 Jenis Dokumen	26.249.576	18 Jenis Dokumen	27.562.055	18 Jenis Dokumen	28.940.157	18 Jenis Dokumen	24.287.638	18 Jenis Dokumen	31.906.523	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen money yang dicetak		175 buku	19.981.500	175 buku	20.980.575	175 buku	22.029.604	175 buku	23.131.084	175 buku	24.287.638	175 buku	25.502.020	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas		86 administrasi	7.878.542.421	86 administrasi keuangan	6.066.621.792	86 administrasi	6.342.220.482	86 administrasi	7.326.942.806	86 administrasi keuangan	8.496.596.046	86 administrasi	8.921.425.848	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jabatan pns yang terfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangannya		86 orang	7.858.542.476	86 orang	6.045.621.850	86 orang	6.320.170.542	86 orang	7.303.790.369	86 orang	8.472.285.988	86 orang	8.895.900.287	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang dicetak		151 Buku	19.999.945	151 Buku	20.999.942	151 Buku	22.049.939	151 Buku	23.152.436	151 Buku	24.310.058	151 Buku	25.525.561	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan		7 administrasi	679.920.110	7 administrasi	713.916.116	7 administrasi	749.611.921	7 administrasi	787.092.517	7 administrasi	826.447.143	7 administrasi	867.769.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlatan/perlengkapan kantor/rumah tangga		15 pengadaan	249.988.864	15 pengadaan	262.488.307	15 pengadaan	275.612.723	15 pengadaan	289.393.359	15 pengadaan	303.863.027	15 pengadaan	319.056.178	

[illegible]

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi			100 koperasi	128.946.000	105 koperasi	109.355.000	110 koperasi	114.496.000	115 koperasi	128.101.000	120 koperasi	143.988.000	120 koperasi	151.187.400	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT			100 koperasi	103.946.170	105 koperasi	83.105.179	110 koperasi	87.023.687	115 koperasi	99.160.572	120 koperasi	113.600.550	120 koperasi	119.280.578	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki SOP/SOM, Persus dll			50 koperasi	24.999.830	53 koperasi	26.249.822	56 koperasi	27.562.313	59 koperasi	28.940.428	61 koperasi	30.387.450	61 koperasi	31.906.822	
				44.38%	96.770.000	48.49%	82.068.000	52.60%	85.926.000	56.71%	96.136.000	60.82%	108.059.000	60.82%	120.740.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	294 kop / 730 kop * 100 = 40.27%		44.38%	96.770.000	48.49% (354 koperasi)	82.068.000	52.60%	85.926.000	56.71%	96.136.000	60.82%	108.059.000	60.82%	114.190.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di nilai			30 Koperasi	96.770.000	40 Koperasi	82.068.000	50 Koperasi	85.926.000	60 Koperasi	96.136.000	70 Koperasi	108.059.000	70 Koperasi	114.190.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Sehat			30 Koperasi	46.770.147	40 Koperasi	29.568.154	50 Koperasi	30.801.162	60 Koperasi	38.254.920	70 Koperasi	47.283.866	70 Koperasi	50.376.109	
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan			6 Koperasi	49.999.853	6 Koperasi	52.499.846	15 Koperasi	55.124.838	15 Koperasi	57.881.080	15 Koperasi	60.775.134	15 Koperasi	63.813.891	
				15.01%	151.435.000	16.18%	128.428.000	17.31%	134.465.000	18.41%	150.443.000	19.49%	169.101.000	19.49%	188.946.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	980/7095*100 =13.81%		15.01%	151.435.000	16.18% (1180 koperasi)	128.428.000	17.31%	134.465.000	18.41%	150.443.000	19.49%	169.101.000	19.49%	188.946.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilatih			130 koperasi	151.435.000	135 koperasi	128.428.000	140 koperasi	134.465.000	145 koperasi	150.443.000	150 koperasi	169.101.000	150 koperasi	188.946.000	

[illegible]

[illegible]

PERUBAHAN
HUN 2021 – 2026 | 68

[illegible]

[illegible]

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	3/970*100			111.556.000	0,62 (6 IKM)	94.608.000	0,93% (9 IKM)	99.055.000	1,24% (12 IKM)	110.826.000	1,55% (15 IKM)	124.570.000	1,86 (18 IKM)	139.189.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	970 IKM	15 IKM	111.556.000	15 IKM	94.608.000	15 IKM	99.055.000	15 IKM	110.826.000	15 IKM	124.570.000	15 IKM	139.189.000		
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi SIINas	970 IKM	150 IKM	111.556.000	150 IKM	94.608.000	150 IKM	99.055.000	150 IKM	110.826.000	150 IKM	124.570.000	150 IKM	139.189.000		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB VII ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel VII.1 berikut ini :

Tabel VII-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Kinerja Tujuan/Sasaran					
		Target Kinerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Presentase Koperasi Aktif	44.30%	44.17% 625 Kop	44.11% 663 Kop	44.12% 642 Kop	44.20% 642 Kop	44.35% 663 Kop	44.50% 684 Kop
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0.18% 314 UM	0.09% 150 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM
Persentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan US \$	0.02% 1.431.784.8 55.09 USD	0.03% 1.481784.85 5.09 USD	0.04% 1.546.789.85 5.09 USD	1.621.784.85 5.09 USD	1.701.784.85 5.09 USD	1.786.784.85 5.09 USD	1.795.284.05 5.09 USD
Persentase Pertumbuhan IKM	0.77% 7331 IKM	0.79% 7389 IKM	0.81% 7449 IKM	0.83% 7511 IKM	0.87% 7576 IKM	0.92% 7716 IKM	0.97% 7646 IKM

Selanjutnya, berikut merupakan program kegiatan beserta sub kegiatan yang mendukung nawakarsa Pemerintah Kabupaten Gresik :

**Tabel VII-2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Yang Mendukung Nawakarsa**

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRESIK AKAS	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1.519.889.410	1.239.742.481	1.297.232.755	1.469.887.742	1.673.085.429	1.889.401.201
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.944.977	209.942.226	220.439.337	231.461.304	243.034.369	255.186.088
GEMA KARYA	3B (BELA, Beli, Bagi) Gresik			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.319.944.433	1.029.782.255	1.076.793.417	1.238.426.438	1.430.051.060	1.634.215.113
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		243.918.590	256.114.520	268.920.245	282.366.258	296.484.571	311.308.799
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	99.999.920	104.999.916	110.249.912	115.762.407	121.550.528	127.628.054
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRESIK AKAS	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan UM yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		5.936.269.000	5.034.393.000	5.271.042.000	5.897.384.000	6.628.781.000	7.406.709.000
GEMA KARYA	One Pesantren One Produk (OPOP)									
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	149.544.820	157.022.061	164.873.164	173.116.822	181.772.663	190.861.297
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	58.246.441	61.158.763	64.216.701	67.427.536	70.798.913	74.338.859
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	66.649.860	69.982.353	73.481.471	77.155.544	81.013.321	85.063.987
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.661.827.879	4.746.229.823	4.968.470.664	5.579.684.097	6.295.196.102	7.056.444.857

Nawakarsa	Output Kunci Nawakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRESIK AKAS GEMA KARYA	Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan One Pesantren One Produk (OPOP)	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi	205.703.000	174.452.000	182.652.000	204.356.000	229.700.000	256.657.000
GEMA KARYA	3B (BELA, Beli, Bagi) Gresik	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.978.000	116.167.000	121.628.000	136.080.000	152.957.000	176.907.000

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis perubahan ini memuat pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi kepala daerah terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan dinas yang selanjutnya dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta pengendalian dan evaluasi perdagangan, sebagai bentuk peran dan tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam membangun dan melayani masyarakat di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 - 2026.

Sistematika Renstra Perubahan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dan telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Dengan tersusunnya Rencana strategis perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro -Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro -Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik akan berpedoman pada renstra perubahan yang telah disusun ini.

Mengesahkan,
KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Dra. MALAHATUL FARDAH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196705281987102001

MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (DINAS KOERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN) SESUAI KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021
KABUPATEN GREKSI
TAHUN 2021-2026

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Baseline 2020	Target						Kode Rekening Rencana Kerangka Majalah/ Indikator/ Program/ Kegiatan	Kategori Program/ Kegiatan	Sub Kategori Program/ Kegiatan	Usuan/Bidang Usuan/Perangkat Daerah/Program	KINERJA	INDIKATOR	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
Terdapatnya terbit administrasi	Pemerataan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																															

Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan	Baseline 2020	Target						Kode Rekening	Uraian/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	KINERJA	INDIKATOR	Formula Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya Pengetahuan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif (%)	Jumlah Koperasi aktif tahun n / jumlah koperasi tahun n * 100	618/1.395*100=44,30%	44,17% (625 Koperasi)	44,11%(633 Koperasi)	44,12% (642 Koperasi)	44,20% (642 Koperasi)	44,35 %(643 Koperasi)	44,50% (684 Koperasi)	2	17	3	PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMERISAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	Jumlah Kop. Aktif grade A tahun n : Jumlah seluruh Kop. Aktif tahun n * 100	400 kope grade A / 618 kop aktif	65.60%(410 koperasi)	128,946,000	66.35%(420 koperasi)	109,355,000	66.98%(430 Kope)	114,586,000	67.48% (440 Kope)	128,101,000	67.87(450 kope)	143,988,000	67.87(450 kope)	151,187,400	Koperasi
													Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Milayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi		100 koperasi	128,946,000	105 koperasi	109,355,000	110 koperasi	114,586,000	115 koperasi	128,101,000	120 koperasi	143,988,000	120 koperasi	151,187,400	Koperasi	
													Pengawasan Keluhan, Keselamatan, Kemendirian, Ketertarikan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT		100 koperasi	103,946,170	105 koperasi	83,105,179	110 koperasi	87,023,687	115 koperasi	99,560,572	120 koperasi	113,600,550	120 koperasi	119,280,578	Koperasi	
													Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki SOP/SOM, Petrus dll		50 koperasi	24,999,830	53 koperasi	26,249,822	56 koperasi	27,562,313	59 koperasi	28,940,428	61 koperasi	30,387,450	61 koperasi	31,906,822	Koperasi	
										2	17	4	PROGRAM PENJAJIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya u/d tahun n : Jumlah seluruh KSP/USP u/d tahun n * 100	264 kop / 730 kop * 100 = 40,27%	44.38%(124 kop)	96,770,000	48.49%(154 kop)	82,068,000	52.60%(184 kop)	85,926,000	56.71%(414 kop)	96,136,000	60.82%(444 kop)	108,059,000	60.82%(444 kop)	114,190,000	Koperasi
										2	17	04	2.01	Pembinaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Milayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di nilai		30 Koperasi	96,770,000	40 Koperasi	82,068,000	50 Koperasi	85,926,000	60 Koperasi	96,136,000	70 Koperasi	108,059,000	70 Koperasi	114,190,000	Koperasi
										2	17	04	2.01	Pelaksanaan Pemetaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Survei		30 Koperasi	46,770,147	40 Koperasi	29,516,154	50 Koperasi	30,801,162	60 Koperasi	38,254,920	70 Koperasi	47,282,896	70 Koperasi	50,376,109	Koperasi
										3	17	04	2.01	Pelaksanaan - Pemetaan - Kesehatan - KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah - Unit - Usaha - Koperasi - yang - Telah -Dinukuti - Pemetaan -Kesehatan						50 unit usaha	30,801,162	60 unit usaha	38,254,920	70 unit usaha	47,282,896	70 unit usaha	50,376,109	Koperasi
										2	17	04	2.01	Peningkatan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan		6 Koperasi	49,999,853	6 Koperasi	52,499,846	15 Koperasi	55,124,838	15 Koperasi	57,881,080	15 Koperasi	60,775,134	15 Koperasi	63,811,891	Koperasi
										3	17	04	2.01	Peningkatan - Kesehatan - KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah - Koperasi - yang - Mendapatkan -Penghargaan -Kesehatan						9 unit usaha	57,881,080	9 unit usaha	57,881,080	9 unit usaha	60,775,134	9 unit usaha	63,811,891	Koperasi
										2	17	5	PROGRAM PENYOSISAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	Jumlah Pengurus Kop yang dilatih u/d tahun n : Jumlah seluruh Pengurus Kop se Kabupaten u/d tahun n * 100	980/7095*100=13,81%	15.03%(1.080 kop)	151,431,000	16.18%(1.180 kop)	128,428,000	17.11%(1.280 kop)	134,465,000	18.41%(1.380 kop)	150,441,000	19.49%(1.480 kop)	169,101,000	19.49%(1.480 kop)	188,946,000	Koperasi
										2	17	5	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Milayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilatih		150 koperasi	151,431,000	155 koperasi	128,428,000	160 koperasi	134,465,000	165 koperasi	150,441,000	160 koperasi	169,101,000	160 koperasi	188,946,000	Koperasi
										2	17	5	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus yang siap mengikuti sertifikasi kompetensi		280 orang	151,431,000	270 orang	128,428,000	280 orang	134,465,000	290 orang	150,441,000	300 orang	169,101,000	300 orang	188,946,000	Koperasi
										3	17	05	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian						280 orang	134,465,000	290 orang	150,441,000	300 orang	169,101,000	300 orang	188,946,000	Koperasi

Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan	Baseline 2020	Target						Kode Rekening	Uraian/Bidang Usaha/Perangkat Daerah/Program	KINERJA	INDIKATOR	Formula Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang																																																																																																																																																																																									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																										
										17 6	PROGRAM PEMBENDAYAKAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	6 Pertumbuhan Direct Koperasi	Jumlah Direct Tahun n - Jumlah Direct Tahun n-1 / Jumlah Direct Tahun Lalu x 100	Rp. 3.912.279.566.064 - Rp. 1.809.057.660.067 / Rp. 1.809.057.660.067 * 100 = 2.71%	2.68%	(Rp. 105.000.000.000)	402.391,000	2.74%	(Rp. 110.000.000.000)	341.257,000	2.79%	(Rp. 115.000.000.000)	357.299,000	2.83%	(Rp. 120.000.000.000)	399.755,000	2.87%	(Rp. 125.000.000.000)	449.313,000	2.87%	(Rp. 125.000.000.000)	502.065,000	Koperasi																																																																																																																																																																																				
										2 17 06 2.01	Pembendayaan dan Perlindungan Koperasi yang Beragatungannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina		130 koperasi	402.391,000	133 koperasi	341.257,000	136 koperasi	357.299,000	139 koperasi	399.755,000	142 koperasi	449.313,000	142 koperasi	502.065,000	502.065,000	Koperasi																																																																																																																																																																																										
										2 17 6 2.01	Pembendayaan, Penguatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Pengembangan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi usahanya		30 koperasi pendok pesantren	402.391,000	30 koperasi pendok pesantren	341.257,000	30 koperasi pendok pesantren	357.299,000	30 koperasi pendok pesantren	399.755,000	30 koperasi pendok pesantren	449.313,000	30 koperasi pendok pesantren	502.065,000	502.065,000	Koperasi																																																																																																																																																																																										
										17 06 2.01	Pembendayaan, Penguatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Pengembangan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kelembagaannya	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kelembagaannya						30 orang	357.299,000	30 orang	399.755,000	30 orang	449.313,000	30 orang	502.065,000	502.065,000	Koperasi																																																																																																																																																																																									
										2 17 7 9	PROGRAM PEMBENDAYAKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, dan USAHA MIKRO (UMKM)	Perantara usaha mikro dengan akses pembiayaan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan tahun n / jumlah usaha mikro tahun n-1 * 100	384/(17419)*100=0.17%	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,936,269,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,034,393,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,271,042,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,897,384,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	6,628,781,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	7,406,709,000	7,406,709,000	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																									
										2 17 7 9 2.01	Pembendayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Berusaha, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan		250 usaha mikro	5,936,269,000	250 usaha mikro	5,034,393,000	250 usaha mikro	5,271,042,000	250 usaha mikro	5,897,384,000	250 usaha mikro	6,628,781,000	250 usaha mikro	7,406,709,000	7,406,709,000	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																										
Meningkatnya Usaha Mikro	% pertumbuhan usaha mikro	(Jumlah usaha mikro tahun n - tahun n-1) / tahun n-1 * 100	"1371.419.571.105 (1721.055 x 100 - 6.18%)14 (Usaha Mikro)	0,09%(150 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	17 06 2.01	Pembendayaan, Penguatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Pengembangan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kelembagaannya	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kelembagaannya							30 orang	357.299,000	30 orang	399.755,000	30 orang	449.313,000	30 orang	502.065,000	502.065,000	Koperasi																																																																																																																																																																																								
																2 17 7 9	PROGRAM PEMBENDAYAKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, dan USAHA MIKRO (UMKM)	Perantara usaha mikro dengan akses pembiayaan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan tahun n / jumlah usaha mikro tahun n-1 * 100	384/(17419)*100=0.17%	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,936,269,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,034,393,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,271,042,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	5,897,384,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	6,628,781,000	0.12%(200 Usaha Mikro)	7,406,709,000	7,406,709,000	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																			
																2 17 7 9 2.01	Pembendayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Berusaha, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan		250 usaha mikro	5,936,269,000	250 usaha mikro	5,034,393,000	250 usaha mikro	5,271,042,000	250 usaha mikro	5,897,384,000	250 usaha mikro	6,628,781,000	250 usaha mikro	7,406,709,000	7,406,709,000	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																				
																2 17 7 9 2.01	Pendidikan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terdota		175000 usaha mikro	149,544,820	10000 usaha mikro	117,022,061	0.10%(10000 usaha mikro)	164,871,164	0.12%(10000 usaha mikro)	179,114,822	0.18%(10000 usaha mikro)	181,772,681	0.18%(10000 usaha mikro)	190,861,297	190,861,297	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																				
																2 17 07 2.01	Pendidikan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Pengembangan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Berdaya, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Pengembangan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kelembagaan Kabupaten/Kota		164,871,164	179,114,822	181,772,681	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	190,861,297	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																	
																2 17 7 9 2.01	Pembendayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan (bersama dengan mitra)		84 usaha mikro	58,246,444	105 usaha mikro	81,194,763	105 usaha mikro	84,216,703	105 usaha mikro	87,427,536	105 usaha mikro	90,798,914	105 usaha mikro	94,286,859	105 usaha mikro	97,968,859	105 usaha mikro	101,768,859	101,768,859	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																
																2 17 07 2.01	Pembendayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pembendayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mendapatkan Kemitraan Usaha Mikro		55 unit usaha	64,216,703	55 unit usaha	64,216,703	55 unit usaha	67,427,536	55 unit usaha	70,798,914	55 unit usaha	74,286,859	55 unit usaha	77,968,859	55 unit usaha	81,768,859	55 unit usaha	85,568,859	85,568,859	Usaha Mikro																																																																																																																																																																															
																2 17 07 2.01	Facilitas Kemitraan Potensi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pembiayaan		1243 usaha mikro	66,541,850	1150 usaha mikro	89,982,351	1150 usaha mikro	79,481,471	1150 usaha mikro	77,155,444	1150 usaha mikro	83,621,121	1150 usaha mikro	89,061,987	1150 usaha mikro	94,561,987	1150 usaha mikro	100,061,987	100,061,987	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																
																2 17 07 2.01	Facilitas Kemitraan Potensi Usaha Mikro	Terlaksananya Kemitraan Potensi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Potensi		150 unit usaha	79,481,471	150 unit usaha	79,481,471	150 unit usaha	77,155,444	150 unit usaha	83,621,121	150 unit usaha	89,061,987	150 unit usaha	94,561,987	150 unit usaha	100,061,987	100,061,987	Usaha Mikro																																																																																																																																																																																	
																2 17 07 2.01	Pembendayaan Kemitraan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses Fasilitas Kemitraan		1244 usaha mikro	5,661,827,879	1998 usaha mikro	4,746,229,823	0.10%(1244 usaha mikro)	4,908,471,684	0.12%(1244 usaha mikro)	5,179,084,097	0.18%(1244 usaha mikro)	5,496,196,102	0.18%(1244 usaha mikro)	5,826,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	6,156,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	6,486,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	6,816,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	7,146,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	7,476,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	7,806,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	8,136,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	8,466,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	8,796,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	9,126,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	9,456,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	9,786,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	10,116,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	10,446,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	10,776,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	11,106,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	11,436,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	11,766,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	12,096,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	12,426,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	12,756,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	13,086,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	13,416,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	13,746,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	14,076,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	14,406,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	14,736,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	15,066,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	15,396,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	15,726,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	16,056,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	16,386,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	16,716,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	17,046,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	17,376,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	17,706,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	18,036,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	18,366,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	18,696,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	19,026,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	19,356,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	19,686,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	20,016,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	20,346,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	20,676,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	21,006,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	21,336,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	21,666,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	21,996,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	22,326,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	22,656,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	22,986,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	23,316,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	23,646,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	23,976,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	24,306,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	24,636,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	24,966,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	25,296,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	25,626,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	25,956,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	26,286,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	26,616,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	26,946,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	27,276,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	27,606,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	27,936,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	28,266,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	28,596,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	28,926,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	29,256,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	29,586,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	29,916,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	30,246,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	30,576,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	30,906,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	31,236,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	31,566,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	31,896,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	32,226,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	32,556,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	32,886,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	33,216,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	33,546,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	33,876,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	34,206,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	34,536,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	34,866,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	35,196,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	35,526,444,857	0.18%(1244 usaha mikro)	35,856,444,857,

Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan	Baseline 2020	Target					Kode Berekang	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program		KINERJA	INDIKATOR	Formula Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM					KABUPATEN/NOTA	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	01	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	
										02						95 KM	154.580,000	98 KM	131,095,000	101 KM	137,218,000	104 KM	151,167,000	144.120,900,00	172,613,000	14412090000%	192,870,000	Perindustrian	
										03																			
										04																			
										05																			
										06																			
										07																			
										08																			
										09																			
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	10	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	
										11						95 KM	154.580,000	98 KM	131,095,000	101 KM	137,218,000	104 KM	151,167,000	144.120,900,00	172,613,000	14412090000%	192,870,000	Perindustrian	
										12																			
										13																			
										14																			
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	15	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	
										16						95 KM	154.580,000	98 KM	131,095,000	101 KM	137,218,000	104 KM	151,167,000	144.120,900,00	172,613,000	14412090000%	192,870,000	Perindustrian	
										17																			
										18																			
										19																			
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	20	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	
										21						95 KM	154.580,000	98 KM	131,095,000	101 KM	137,218,000	104 KM	151,167,000	144.120,900,00	172,613,000	14412090000%	192,870,000	Perindustrian	
										22																			
										23																			
										24																			
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	25	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	
										26						95 KM	154.580,000	98 KM	131,095,000	101 KM	137,218,000	104 KM	151,167,000	144.120,900,00	172,613,000	14412090000%	192,870,000	Perindustrian	
										27																			
										28																			
										29																			
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk kerajinan KM	%Pertumbuhan KM	Jumlah KM tahun t-1 x Jumlah KM Tahun t / Jumlah KM Tahun t-1 * 100	(7331: 7275)/(7275*100=5,73%)7331: 7464 KM	(0,79%) 7389 KM	(0,81%) 7449 KM	(0,83%)7511 KM	(0,87%) 7576 KM	(0,92%)7716 KM	(0,97%)7846 KM	30	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	KABUPATEN/NOTA	PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USHAH INDUSTRI	Persentase KM yang mendapat Fasilitas	$\frac{80}{(7331:300)} * 100 = 1,08\%$ (80 KM)	1,30% (82 KM)	154.580,000	1,35% (85 KM)	131,095,000	1,39% (88 KM)	137,218,000	1,43% (101 KM)	151,167,000	1,47% (104 KM)	172,613,000	1,47% (104 KM)	192,870,000	Perindustrian	